

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD merupakan dua pilar utama yang mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah Bogor dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat akan merasa yakin bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab. Selain itu, dengan adanya mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang kuat, peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dana publik dapat diminimalkan. Proses pengawasan yang ketat dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan akan membuat pihak-pihak yang berpotensi melakukan penyelewengan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2022 Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Menurut hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan tiga indikator akuntabilitas menurut Kohler yaitu:

1. Kewajiban seseorang memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan publik seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap orang, terlepas dari perannya dalam suatu organisasi atau proyek, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik, menjaga integritas, dan bertanggung jawab atas hasil dari tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Penerapan konsep akuntabilitas ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja atau kegiatan yang efisien, efektif, dan berintegritas.

Sesuai yang telah disampaikan oleh kepala bagian keuangan Bappenda bahwa bentuk tanggung jawab yang dilakukan adalah dengan cara memastikan bahwa seluruh anggota tim nya terlibat secara efektif pada proses pengelolaan APBD Kabupaten Bogor, caranya yaitu dengan mengadakan rapat dan koordinasi secara berkala untuk membahas sejauh mana progres nya dan untuk memastikan bahwa semua anggota menguasai dengan benar tugas masing-masing yang telah diberikan. Staff Bappenda pun memiliki kewajiban untuk memonitor penggunaan anggaran agar penggunaannya selalu efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

2. Pengukuran Tanggungjawab melibatkan sejauh mana seseorang atau organisasi mematuhi standar akuntabilitas yang berlaku. Dengan dilakukannya evaluasi memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana tujuan dan sasaran yang tercantum dalam APBD pada Kabupaten Bogor telah tercapai, serta memungkinkan identifikasi area yang memerlukan

perbaikan. Seperti yang sudah dikatakan bahwa Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun, tujuannya untuk menyusun strategi dalam pelaksanaan APBD tahun selanjutnya.

3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, *control, regulation, agreement or custom must be good.*

Dalam pelaksanaan penyusunan APBD Kabupaten Bogor semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah tercantum pada Perda bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan Perundang-undangan, ini artinya sudah berhasil mengimplementasikan konsep dari manajemen yang baik itu sendiri. Selanjutnya dilakukan pula pengelolaan risiko dimana pengelolaan risiko yang efektif membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan APBD.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (9) Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Bappenda memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses, dari penyusunan hingga pelaksanaan APBD, dilakukan secara akuntabel dan transparan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan, dan transparansi adalah jembatan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi juga tercermin dalam keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengawasi dan menilai penggunaan dana publik. Melalui partisipasi aktif masyarakat, dapat terwujud suatu

sistem pengawasan yang lebih kuat, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam era teknologi informasi, pemanfaatan platform digital dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan mendapatkan umpan balik secara langsung.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bogor, beberapa masyarakat mengerti soal APBD, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada masyarakat yang kurang paham mengenai literasi keuangan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Mereka seolah tidak mau tahu tentang isu-isu keuangan yang ada, padahal dari penyediaan informasi Bappenda sudah cukup baik karena sudah menyediakan platform informasi seperti website yang dapat diakses dengan mudah, dimana saja, dan kapan saja. Pihak pemerintah daerah harus sering melakukan sosialisasi mengenai hal ini, sehingga tidak hanya beberapa saja warga yang benar-benar mengerti dan tertarik untuk mencari tahu informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara keseluruhan, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga suatu prinsip dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kedua aspek ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2022 yaitu Bappenda Kabupaten Bogor dapat meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat mengenai keuangan daerah, dengan melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD. Berikan pemahaman yang jelas melalui konten-konten edukasi mengenai keuangan lewat media massa/media sosial agar literasi keuangan masyarakat dapat meningkat. Serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana publik. Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terapkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan terbuka, serta platform e-government untuk memudahkan akses dan pemantauan oleh masyarakat.

